

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tugas, dan Kewenangan Polisi Republik Indonesia Sebagai Penyidik

2.1.1 Tugas, dan Kewenangan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kepolisian telah diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2000 Tentang Kepolisian yang merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸ Berikut Penyidik dan Penyelidik dalam Perspektif teori :

a. Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”⁹

Dapat diartikan bahwa anggota penyidik adalah pihak kepolisian yang berkewenangan sebagai penyidik dalam hal ini untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka kasus kejahatan.

b. Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

⁸ Lihat pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2000 Tentang Kepolisian

⁹ Lihat pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁰

Penyidik dalam hal ini ialah bergerak dalam mencari berbagai barang dan alat bukti yang terdapat hubungannya dengan tersangka, lalu dikumpulkan untuk sebagai dasar kekuatan menahan tersangka dan penguat bagi perbuatan pidana yang telah di temukan sisi pidananya oleh penyidik.

c. Menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”¹¹

Jika diartikan bahwa anggota penyidik adalah sama yang merupakan anggota kepolisian yang berkewenangan sebagai penyidik untuk melakukan tugasnya terhadap kejahatan yang beredar dimasyarakat.

d. Menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 ayat (2) KUHAP

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat (4) KUHAP

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹²

Berbeda dengan pengertian pada Pasal 1 ayat (4) KUHAP dan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, namun pada pasal ini menjelaskan secara prakteknya. Bahwa penyelidikan bertugas untuk mencari kejelasan atau terang dari suatu tindak pidana, atau mencari kejelasan dari sisi pidananya apakah dapat dikatakan perbuatan pidana atau bukan.

Dalam proses penyidikan suatu tindak pidana ada beberapa tahapan penyidik sebelum memulai penyidikan yaitu yang disebut di dalam Pasal 4 Perkapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan dengan dasar dilakukan penyidikan, antara lain :

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (lhp);
- d. Surat perintah penyidikan;
- e. SPDP.¹³

Adapun beberapa surat penugasan sebelum dilakukannya proses penyidikan yang disebut di dalam Pasal 6 Perkapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan antara lain :

Surat perintah tugas sebagaimana yang disebut diatas adalah dalam Pasal 4 huruf b, sekurang-kurangnya memuat :

- a. Dasar penugasan
- b. Identitas petugas
- c. Jenis penugasan

¹² *Ibid*, Pasal 1 ayat (5) KUHAP

¹³ Lihat pada Pasal 4 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

- d. Lama waktu penugasan
- e. Pejabat pemberi perintah.¹⁴

Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Dasar penyidikan
- b. Identitas petugas tim penyidik
- c. Jenis perkara yang disidik
- d. Waktu dimulainya penyidikan
- e. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.¹⁵

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik dalam mengungkap kasus kejahatan pencurian bank antara lain :

(1) Kegiatan penyelidikan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. Pengolahan Tempat Kejadian Peristiwa
- b. Pengamatan (*observasi*)
- c. Wawancara (*interview*)
- d. Pembuntutan (*surveillance*)
- e. Penyamaran (*under cover*)
- f. Pelacakan (*tracking*)
- g. Penelitian dan analisis dokumen.¹⁶

(2) Sasaran penyelidikan penyidik meliputi:

- a. Orang
- b. Benda atau barang
- c. Tempat
- d. Peristiwa/kejadian
- e. Kegiatan.¹⁷

Pasal 5 Perkapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen

Penyidikan, kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. Penyelidikan
- b. Pengiriman SPDP
- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Gelar perkara
- f. Penyelesaian berkas perkara
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum

¹⁴ Lihat pada Pasal 6 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

¹⁵ Lihat pada Pasal 8 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

¹⁶ Lihat pada Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

¹⁷ *Ibid.*

- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti
- i. Penghentian penyidikan.¹⁸

Pembentukan tim manajemen penyidik sebelum pada saat melakukan penangkapan pencurian bank tertera di dalam Pasal 21 Perkapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan :

- (1) Atasan selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia, untuk :
 - a. Pembentukan tim penyidik
 - b. Dukungan anggaran penyidikan
 - c. Dukungan peralatan
- (2) Sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a ialah pembentukan tim penyidik disesuaikan dengan kompetensi penyidik dan kriteria tingkat kesulitan perkara yang ditangani, dan dapat dibentuk tim penyidik gabungan dari beberapa satuan fungsi Reskrim (*join investigation team*).
- (3) Tim penyidik dapat dibantu oleh tim bantuan teknis dan tenaga ahli.¹⁹

Manajemen Keorganisasian Penyidik sebelum melakukan penangkapan pencurian bank terdapat pada Pasal 22 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan :

- (1) Tim penyelidikan terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil ketua
 - c. Anggota
- (2) Personel yang ditunjuk dalam tim penyelidikan harus memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas, sesuai dengan perkara yang ditangani.
- (3) Tim penyelidikan dibentuk dengan surat perintah.²⁰

2.1.2 Kewenangan penyidik dalam menanggulangi kejahatan

¹⁸ Lihat pada Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

¹⁹ Lihat pada Pasal 21 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

²⁰ Lihat pada Pasal 22 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

Kewenangan penyidik telah diatur di dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP yang secara rinci dan mengkaji teknis daripada pelaksanaan praktik penyidik di lapangan, sebagai berikut :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a

KUHAP karena kewajibannya mempunyai kewenangan :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh/meminta berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.²¹

²¹ Lihat pada Pasal 7 (1) KUHAP

Pejabat Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dalam hal pengungkapan kasus kejahatan pencurian nasabah bank adalah penyidik, berdasarkan bunyi peraturan dalam KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan. Tetapi untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat memerintah penyidik untuk melakukan penangkapan.²² Pasal 16 ayat (1) KUHAP bahwa : untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penangkapan

Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KUHAP juga mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²³

Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam penangkapan, Pertama pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. KUHAP mengkaji hal tersebut dan hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan. Tetapi untuk kepentingan penyelidikan,

²² Edy Sunaryo Berutu. 2017, *Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Media Neliti, Lex Crimen Vol. VI/No. 06/Agustus/2017. Tanpa Kampus.

²³ Lihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

penyidik dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP). Jadi ketika kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan hanya dalam tahap penyelidikan dan itu atas perintah penyidik. Jika dapat diketahui tidak ada perintah oleh penyidik dan penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan.²⁴

Ke-dua, alasan penangkapan. Berdasarkan definisi penangkapan di atas, penangkapan diperbolehkan jika memang “terdapat cukup bukti”. Dengan mengacu kepada Pasal 17 KUHAP, frase ini dimaknai sebagai “seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu, sehingga dalam praktik hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Maka, perlu ada definisi yang tegas mengenai makna bukti permulaan yang cukup, misalnya penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyidik atas perintah penyidik jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. 18 Alasannya, selain meminimalisir penggunaan subjektifitas penyidik atau penyidik dalam melakukan penangkapan, juga agar penangkapan yang dilakukan penyidik tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia tersangka/terdakwa.²⁵

Ke-tiga, tata cara penangkapan. Penyidik atau penyidik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan

²⁴ Edy Sunaryo Berutu, *Op.Cit.*

²⁵ *Ibid.*

menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jika tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak diperlukan. Tapi, penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18 KUHAP). Penangkapan tidak diadakan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara langsung dan sah dua kali berturut-turut namun tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah/jelas.²⁶

Ke-empat, jangka waktu penangkapan. Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari. Ini artinya, penyidik atau penyelidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Penangkapan yang dilakukan lebih dari 24 jam harus dinyatakan batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia seseorang. Berbeda dengan penangkapan, penahanan berdasarkan Pasal 1 ayat (21) KUHAP diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum dan/atau hakim dengan penetapannya, serta dalam hal menurut cara yang diatur oleh undang-undang.²⁷

1.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Berlanjut

Perbuatan suatu tindak pidana berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa : “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pokok yang paling berat”.²⁸

Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama dalam waktu yang beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut terdapat hubungan yang sedemikian eratny atau saling berhubungan sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut.²⁹

1.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian

- a. Unsur Objektif :
 1. Barang sesuatu
 2. Seluruhnya atau sebagian punya orang lain
- b. Unsur Subyektif :
 1. Barangsiapa mengambil
 2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum³⁰

2.4.1 Pencurian biasa menurut Pasal 362 KUHP

Perumusan tindak pidana pencurian biasa sudah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa : ”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

²⁸ Nazir. 2015. *Tinjauan Yuridis tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Vol. 3 Tahun 2015, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako.

²⁹ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 32.

³⁰ Tim Visi Yustisia, 2014, *KUHP dan KUHP*, Jakarta Selatan , Penerbit Jagakarsa, hal. 132.

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.³¹

2.4.2 Pencurian dengan pemberatan menurut Pasal 363 ayat (4) KUHP

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang pelaksanaannya disertai keadaan yang memberatkan, salah satu pengertian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dibawah ini sebagai berikut :

Ayat 4 bahwa : “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.³²

2.4.3 Pencurian ringan menurut Pasal 364 KUHP

Tindak pidana pencurian ringan merupakan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan tindak pidana pencurian ringan sudah diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan : ”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.³³

2.5 Tinjauan Umum Tentang Bank

³¹ Lihat pada Pasal 362 KUHP.

³² Lihat pada Pasal 363 ayat (4) KUHP

³³ Lihat pada Pasal 364 KUHP

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal sebagai banknote.³⁴

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat banyak.³⁵

Dari uraian di atas dapat dijelaskan secara merinci bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, segala bentuk aktivitas perbankan juga tidak jauh berkaitan dalam bidang keuangan. Aktivitas perbankan dalam hal pelaksanaan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan ialah kegiatan *funding*. Maksud dari pengertian diatas adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.³⁶

Pasal 1 ayat (1) Bahwa, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁷

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tentang Perbankan menurut jenisnya, bank terdiri sebagai berikut :

a. Bank Umum

³⁴ Wikipedia, *Definsi Bank*, <https://id.wikipedia.org>, 12 November 2018

³⁵ Lihat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

³⁶ Dr. Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, hal. 24.

³⁷ *Op.Cit.*, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁸

b. Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa : Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.³⁹

Adapun kegiatan-kegiatan bank antara lain :

a. Bank umum

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk :
 - a) Simpanan giro
 - b) Simpanan tabungan
 - c) Simpanan deposito
- 2) Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk :
 - a) Kredit investasi
 - b) Kredit modal kerja
 - c) Kredit perdagangan
- 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Service*)

b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk :
 - a) Simpanan tabungan
 - b) Simpanan deposito
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk :
 - a) Kredit investasi
 - b) Kredit modal kerja
 - c) Kredit perdagangan
- 3) Larangan bagi bank perkreditan rakyat adalah :
 - a) Menerima simpanan giro
 - b) Mengikuti kliring

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

- c) Melakukan kegiatan valuta asing
- d) Melakukan kegiatan perasuransian⁴⁰

Perlu diketahui bahwa dalam hukum perbankan terdapat berbagai pengertian mengenai tindak pidana. Secara garis besar ada dua pengertian yang perlu dibedakan dan dipahami, yaitu tindak pidana perbankan, dan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang perbankan. Ada pula yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*).⁴¹

2.6 Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

Teori hukum atau dikenal dengan efektivitas hukum tentu berbeda dengan apa yang kita pahami dengan hukum positif, ini perlu dipahami guna menghindari kesalahpahaman, bahwa seolah-olah tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Ada kajian filosofis di dalam teori hukum sebagaimana dikatakan Radbruch bahwa, tugas teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh *postulat-postulat* hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁴² Hukum mencakup banyak aktivitas dalam ragam aspek kehidupan manusia. Penggunaannya merefleksi terjadinya keragaman “permainan bahasa”

⁴⁰ Dr. Kasmir, *Op.Cit.* Hal. 38-40.

⁴¹ Maestro Sihalo, *Bank Dalam Perspektif Hukum*, <https://www.kabarhukum.com>, 12 November 2018.

⁴² Prof. Dr. H.R Otje Salman S., SH., dan Anthon F. Susanto, SH., M.Hum, 2007, *Teori Hukum*, Bandung, Penerbit PT Refika Aditama, hal. 45.

sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *Wittgensteinian* dengan menempatkan penggunaan kata-kata dalam konteks interaksi manusia dan kehidupan sosial secara umum. Pada masing-masing makna hukum merupakan gambaran deskriptif yang digunakan untuk menunjuk beberapa ciri-ciri kehidupan sosial tempat permainan bahasa tersebut berlangsung.⁴³

2.6.1 Unsur-Unsur Efektivitas Hukum

- a. Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang.
- b. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian yang terkecil dari sistem itu.
- c. Teori hukum mampu menjelaskan persoalannya sebagaimana adanya tanpa adanya keterkaitan dengan orang (pengamat).⁴⁴

2.6.2 Komponen-Komponen Efektivitas Hukum

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut

⁴³ Prof. Dr. H.R Otje Salman S., SH., dan Anthon F. Susanto, SH., M.Hum, *Op.Cit*, hal. 5.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 46-47.

mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.⁴⁵

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structue of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi kewenangangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Di antara lain pendapat Friedman :

- a. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan kewenangangkat hukum yang ada.
- b. Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah, aspek lain dari sistem hukum ialah substansinya. Substansi sistem hukum yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu sendiri. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Kewenangan Saksi*, Bandung, Penerbit Remaja Karya, 1985, hal.7

memiliki kekuatan yang mengikat serta menjadi pedoman untuk para aparat penegak hukum.

- c. Mengenai budaya hukum, Lawrence M. Friedman memiliki pandangannya bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum dari aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun sistem penataan struktur hukum dalam menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan juga sebaik apapun kualitas dari substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁴⁶

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, 1984, *Sistem Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Nusa Media, hal. 5-6